

**PENGARUH PENGAWASAN, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
KEUANGAN TERHADAP KINERJA BPKAD PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Nama : Chaya Wahyu Nakita
NIM : 222018128**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023**

**PENGARUH PENGAWASAN, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
KEUANGAN TERHADAP KINERJA BPKAD PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Chaya Wahyu Nakita
NIM : 222018128**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chaya Wahyu Nakita

NIM : 222018128

Konsentrasi : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Maret 2023
Yang Menyatakan,



Chaya Wahyu Nakita
NIM: 222018128

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi
Terhadap Kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Chaya Wahyu Nakita
Nim : 222018128
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Progran Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal ...Maret 2023

Pembimbing I,



Welly.S.E.,M.Si
NIDN : 0212128102

Pembimbing II,



Anggrelia Afrida.S.E.,M.Si
NIDN : 0218048403

Mengetahui,

Dekan

u/b ~~Komisi~~ Program Studi Akuntansi



Dr. Beffi.S.E.,M.Si,AK.CA
NIDN : 0216106902

HALAMAN *MOTTO* DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barangsiapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu dan barangsiapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu”. **(H.R. Ahmad)**

“Dan apabila dikatakan “berdirilah kamu” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”. **(Q.S. Al-Mujaadila:11)**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta Bapak Supargi dan Ibu Tri Sumarni.
- ❖ Kakak perempuanku, Anggun Setia Ningrum, Amd.Keb dan adik perempuanku, Chesa Ayudea Pamestri.
- ❖ Beserta keluarga besarku.

PRAKATA



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja BPKAD Povinsi Sumatera Selatan yang mana skripsi ini diajukan sebagai syarat pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

Terima kasih yang tiada hentinya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Supargi dan Tri Sumarni. Kakak perempuanku, Anggun Setia Ningrum, Amd. Keb dan adik perempuanku Chesa Ayudea Pamestri, beserta seluruh keluarga besar yang Insya Allah selalu diberkati oleh-Nya. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua serta selalu dalam perlindungan Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, arahan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom, DS, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Dr. Betri, S.E., M.Si., AK., C.A, selaku Ketua Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Welly, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Anggrelia Afrida, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar membimbing, mendidik dan memberikan arahan serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr.Betri, S.E,M.Si,AK,CA dan Bapak Muhamaad Fahmi, S.E.,M.Si selaku Dosen Penelaah Seminar Proposal yang telah memberikan arahan, masukan dan saran yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat disempurnakan dengan baik.
6. Ibu Welly, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing serta memberikan arahan dalam membantu perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tulus memberikan ilmu dan pengajaran yang bermanfaat serta memberikan banyak nasehat kepada penulis selama belajar di Universitas Muhammadiyah Palembang, serta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan kelancaran administrasi.
8. Bapak H.Akhmad Mukhlis, S.E., M.Si., selaku Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Seluruh pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Selatan selaku responden yang telah berpartisipasi memberikan jawaban dalam proses pembuatan skripsi.
10. Teman dekat yang kusayangi, Muhammad Wisnu Hidayat,S.M yang turut memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi serta

sahabatku Kinara,Hanne,Dinda dan Tata yang telah memberikan sumbangsih pemikiran selama perkuliahan, memberikan semangat dan menemani selama perkuliahan.

11. Rekan sejawat, Theo Rima Syustika yang telah menemani dalam melakukan penelitian di tempat yang sama serta memberikan banyak masukan dalam penulisan skripsi. Serta seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
12. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Mengingat keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca serta dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukan penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Maret 2023

Chaya Wahyu Nakita

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II. LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori	17
B. Kerangka Pemikiran	32
C. Hipotesis	34
	Halaman

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Operasionalisasi Variabel	36
D. Populasi dan Sampel Penelitian	37
E. Data yang Diperlukan	38
F. Metode Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis	40

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan	73

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	81
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Hasil Survei Pendahuluan	11
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya	30
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	36
Tabel III.2 Jumlah Populasi Berdasarkan Tingkat Bidang Pekerjaan	39
Tabel III.3 Sampel Penelitian PT. Rimbang Jaya Ogan Komering Ilir (OKI)	32
Tabel IV.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel IV.2 Responden Berdasarkan Pendidikan	54
Tabel IV.3 Responden Berdasarkan Bagian	55
Tabel IV.4 Responden Berdasarkan Masa Kerja	55
Tabel IV.5 Data Penelitian	56
Tabel IV.6 Pengawasan (X_1)	58
Tabel IV.7 Akuntabilitas (X_2)	60
Tabel IV.8 Transparansi (X_3)	62
Tabel IV.9 Kinerja BPKAD (Y)	64
Tabel IV.10 Hasil Uji Validitas	66
Tabel IV.11 Hasil Uji Reliabilitas	67
Tabel IV.12 Hasil Uji Multikolinearitas	68
Tabel IV.13 Hasil Regresi Linier Berganda	69
Tabel IV.14 Hasil Uji t	72
Tabel IV.15 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	34
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan	52
Gambar IV.2 Uji Heterokedastisitas	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner
- Lampiran 2. Identitas Responden
- Lampiran 3. Tabulasi Data Variabel Pengawasan (X_1) (Data Ordinal)
- Lampiran 4. Tabulasi Data Variabel Akuntabilitas (X_2) (Data Ordinal)
- Lampiran 5. Tabulasi Data Variabel Transparansi (X_3) (Data Ordinal)
- Lampiran 6. Tabulasi Data Variabel Kinerja (Y) (Data Ordinal)
- Lampiran 7. Tabulasi Data Variabel Pengawasan (X_1) (Data Interval)
- Lampiran 8. Tabulasi Data Variabel Akuntabilitas (X_2) (Data Interval)
- Lampiran 9. Tabulasi Data Variabel Transparansi (X_3) (Data Interval)
- Lampiran 10. Tabulasi Data Variabel Kinerja (Y) (Data Interval)
- Lampiran 11. Hasil Perhitungan Data Menggunakan Program *Statistical Product and Service Solutions (SPSS) Version 23,00 for Windows*
- Lampiran 12. Nilai r_{tabel} (Nilai r *Product Moment*)
- Lampiran 13. Titik Persentase Distribusi t (df = 81–120)

ABSTRAK

Chaya Wahyu Nakita/222018128/2023/Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan/Akuntansi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kinerja BPKAD?. Apakah akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja BPKAD?. Apakah transparansi keuangan berpengaruh terhadap kinerja BPKAD? Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif untuk mengetahui pengaruh pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi keuangan terhadap kinerja BPKAD. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan hipotesis, Uji t dan koefisien determinasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) ada pengaruh signifikan pengawasan terhadap kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2) ada pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 3) ada pengaruh signifikan transparansi terhadap kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: pengawasan, akuntabilitas, transparansi, kinerja

ABSTRACT

Chaya Wahyu Nakita/222018128/2023/*The Influence of Supervision, Accountability and Financial Transparency on the Performance of BPKAD of South Sumatra Province/Accounting.*

The formulation of the problem in this study is: Does financial supervision affect BPKAD performance? Does financial accountability affect BPKAD performance? Does financial transparency affect BPKAD performance? This research includes associative research to determine the effect of oversight, accountability, and financial transparency on BPKAD performance. Data collection methods in this study are interviews and observation. The data analysis technique used is multiple linear regression with the hypothesis, t test and coefficient of determination. The results of the analysis show that: 1) there is a significant effect of supervision on the performance of BPKAD of South Sumatra Province, 2) there is a significant effect of accountability on the performance of BPKAD of South Sumatra Province, 3) there is a significant effect of transparency on the performance of BPKAD of South Sumatra Province.

Keywords: *supervision, accountability, transparency, performance*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik, terutama di Indonesia semakin maju dan meningkat karena dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan memfokuskan serta menitikberatkan kepada pemerintah daerah. Selain itu, banyaknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, yang dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan dapat tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik.

Perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Kabupaten/Kota membawa konsekuensi perubahan pada pola dan system pengawasan yang mendasar dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kinerja pegawai dikatakan baik dapat dilihat dari tingkat pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal.

Tata kelola keuangan pemerintah di Indonesia telah mengalami perubahan pada saat bergulirnya reformasi sehingga memberikan dampak kepada Indonesia. Bergulirnya reformasi tersebut muncul karena adanya desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah di setiap wilayah Indonesia. Terbentuknya desentralisasi tersebut memberikan tujuan agar terfokusnya kesejahteraan masyarakat di setiap daerah melalui instansi pemerintahan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah diharapkan pembangunan pada masing-masing daerah menjalankan tugasnya dengan mengedepankan aspirasi masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah serta dapat mempertanggungjawabkan pengalokasian dana yang dimiliki.

Kinerja suatu organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan (Mohamad, 2016: 4). Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program berhasil atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Ihyaul, 2017: 20).

Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan

kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas, transparansi. Memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat.

Desentralisasi melahirkan otonomi daerah menyebabkan pemerintahan dituntut oleh masyarakat memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Kinerja pegawai berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi. Selain pengawasan hal sangat penting akuntabilitas juga sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. Selain pengawasan dan akuntabilitas yang diperlukan dalam instansi pemerintah transparan atau terbuka juga diperlukan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, karena merupakan salah satu prinsip good governance. Pengawasan, akuntabilitas dan transparansi keuangan harus ditunjukkan kepada pegawai agar kinerja pegawai bisa stabil dan konsisten

Suatu instansi pemerintah sangat erat kaitannya dengan pengawasan dan transparansi. Pengawasan di suatu instansi pemerintah juga sangat penting dilakukan, karena Pengawasan merupakan tindakan nyata dan paling

efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai organisasi (Hasibuan, 2009). Pengawasan pada suatu instansi pada dasarnya mencakup segala tindakan agar berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku (Khoiriah dan Rahayu, 2021). Sudasri (2016) mengemukakan bahwa hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Sehingga apabila suatu instansi menerapkan pengawasan yang baik, maka berdampak pada kinerja. Sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Semakin lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan berhasil dengan baik. Dengan pengawasan yang baik akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kerja yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat yang baik. . Pengawasan keuangan instansi pemerintah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang -undangan yang berlaku.

Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik

(Hafidhuddin, 2012:34). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Salah satu prinsip keuangan daerah yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu: 1) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya, 2) aspek pengelolaan (sterwarship) keuangan daerah secara abik, perlindungan asset fisik dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2016).

Pengawasan dan akuntabilitas dalam suatu instansi juga harus bersifat transparan atau terbuka. Keuangan dan pembiayaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu manajemen instansi pemerintah. Dengan kata lain, mengingat setiap kegiatan memerlukan biaya, komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola secara lebih efektif, efisien, dan transparan agar dana yang ada dapat menunjang tercapainya tujuan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.

Performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang dalam suatu instansi pemerintah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan instansi pemerintah secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika.

Pengawasan mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian akan tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka.

George R. Terry (2005:232) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan perbaikan sedemikian rupa hingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana.

T. Hani Handoko (2003:359) adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan, langkah proses pengawasan adalah langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.

Siagian (2001:25) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.

Beberapa pengertian di atas dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan, sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Semakin lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan berhasil dengan baik. Adanya pengawasan yang baik akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kerja yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat yang baik.

Halim (2014:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Tiwinarni (2017:18) akuntabilitas publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan.

Akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan.

Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintahan desa dengan

masyarakat sehingga tercipta pemerintahan desa yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan suatu instansi yang bergerak dalam organisasi sektor publik yang dinaungi oleh pemerintah daerah, sehingga memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan-pelayanan yang telah diberikan oleh instansi pemerintah. Pada awalnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan bernama Biro Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Kapten Arivai No. 3 Palembang, Biro Keuangan berdiri sejak adanya Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814).

Terbitkannya peraturan daerah TK I Sumatera Selatan Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pengguna yang baru dengan tugas dan fungsi yang sama maka pada tahun 2012 Biro Keuangan resmi diganti menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah .

Berdasarkan hasil penelitian Purnama dan Nadirsyah (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan instansi pemerintah yang dimana hasil kinerja pegawai dapat dinikmati oleh masyarakat. BPKAD memiliki peran dalam pengelolaan keuangan yang dibutuhkan untuk periode tertentu serta pencapaian visi, misi, serta tujuan yang diharapkan sehingga dapat berjalan secara ekonomi, efisien, dan efektif.

Tabel 1.1
Hasil Survei Pendahuluan

Nama Responden	Fenomena yang diterima
Arlini Sutrisno, S.E (Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian)	Arlini Sutisno,S.E mengatakan bahwa: 1. Pengawasan keuangan yang terjadi di BPKAD masih sedikit lemah, penyimpangan dana sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. 2. Sistem kinerja yang terjadi pada BPKAD masih belum bisa mewujudkan hasil yang maksimal dikarenakan masih ada beberapa pegawai yang kurang profesional dalam bidangnya masing-masing.
Rita Elysa Siregar, S.E,Ak (Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah)	Rita Elysa Siregar,S.E,Ak mengatakan bahwa alam penyelenggaraan sistem transparansi, masyarakat masih belum maksimal dan kesulitan dalam mengakses informasi laporan keuangan yang diharapkan. Namun, BPKAD terus meningkatkan kinerja dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sumber : Penulis,2022

Berdasarkan tabel di atas informasi yang diperoleh dari survei pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya melalui wawancara beberapa pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa sistem yang terjadi masih kurang maksimal yakni seperti sistem pengawasan,akuntabilitas serta transparansi dikarenakan kinerja yang masih belum cukup baik .

Dampak bagi instansi BPKAD adalah kinerja badan pengelola keuangan dan aset daerah menjadi kurang berjalan dengan baik dalam mengelola keuangan daerah sehingga pelaksana APBD akan berdampak secara langsung terhadap pelaksanaan pembangunan pada daerah.

Pada pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang efektif dan efisien yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, yaitu terkait tindak pidana kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial. Mantan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Selatan, Laoma PL Tobing divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A khusus Palembang. Ia terbukti lakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor. (<https://amp.kompas.com/regional/read/2017/08/25/15234061/korupsi-dana-hibah-kepala-bpkad-sumsel-divonis-5-tahun-penjara>). Mengindikasikan bahwa dalam proses penggunaan dana, tidak ada pertanggungjawaban dan transparansi yang jelas yang menyebabkan pengawasan keuangan pemerintah daerah semakin melemah.

Kurangnya pertanggungjawaban pemerintah dalam setiap anggaran dan realisasi yang dicapai dalam setiap kegiatan. Pemerintah selalu memberikan penjelasan pada masyarakat yang tidak masuk akal atau sulit dicerna oleh masyarakat. Masyarakat kurang yakin atas pendapat yang diberikan oleh pemerintah setempat, sehingga membuat masyarakat tidak puas atas pertanggungjawaban yang diberikan pihak pemerintah atas kegiatan yang diselenggarakan dengan anggaran dana yang tidak terhitung nilainya.

Penerapan transparansi pada setiap perangkat daerah belum maksimal. Hal ini disebabkan banyak akses internet yang tidak dapat digunakan oleh masyarakat, sehingga ketika masyarakat membutuhkan

informasi tersebut masyarakat harus ke kantor terlebih dahulu. Meningkatkan kinerja pemerintah dengan baik dengan melakukannya keterbukaan informasi yang relevan maupun akurat. Pemerintahan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraan pemerintahannya mudah diakses atau diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah. Langkah yang diambil untuk Open Government Indonesia (OGI) adalah dengan melanjutkan upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif sehingga dalam kinerja pemerintah diharapkan meningkat.

Sebagai salah satu aparatur lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencakup seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penelitian sejenis ini pernah dilakukan oleh Fifit dan Nadirsyah (2016) hasil penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian dari Risdhayanti, dkk (2016) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Sama halnya dengan penelitian dari Hari dan Muhammad (2016) yang menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian dari Nopriansyah, dkk (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, namun berbeda dari Penelitian Shinta, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan di dinas pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian dari Nopriansyah, dkk (2016) menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan penelitian dari Lucy, dkk (2014) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ” Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya permasalahan dan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kinerja BPKAD?
2. Apakah akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja BPKAD?
3. Apakah transparansi keuangan berpengaruh terhadap kinerja BPKAD?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kinerja BPKAD.
2. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja BPKAD.
3. Untuk mengetahui apakah transparansi keuangan berpengaruh terhadap kinerja BPKAD.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengawasan ,akuntabilitas dan partisipasi keuangan serta kinerja

instansi, selain itu penelitian ini untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu Akuntansi Sektor Publik yang sudah ditempuh selama kuliah.

2. Bagi BPKAD Prov. Sumatera Selatan

Diharapkan menjadi masukan dan manfaat bagi pemerintah daerah agar lebih memperhatikan kinerja pegawai dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Corporate Government).

3. Bagi Almamater

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adiwirya, M.F. dan I.P. Sudana. 2015. Akuntabilitas, Transparansi Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal*. Akuntansi Universitas Udayana. 11(2) : 01-15.
- Aprianti, E.R. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 6(12) : 01-17.
- Auditya, L. Husaini dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*.3(1) : 21-41.
- Benawan, E.T.P, D.P.E. Saerang, dan W. Pontoh. 2018. Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 13(3) : 72-79.
- Welley, (2022) PK Periksa Kepala BPKAD Sumsel, Terkait Kasus Dugaan Korupsi BUMD ,dari <https://detiksumsel.com/kpk-periksa-kepala-bpkad-sumsel-terkait-kasus-dugaan-korupsi-bumd/>
- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivarite Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8 Cetakan ke VII. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ichsan, R. 2013. Teori Keagenan (Agency Theory). <https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agency-theory>.
- Lukas, M., B. Tewel, M.D.Walangitan. 2017. Pengaruh Pengawasan, Kepemimpinan, Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *E-Jurnal EMBA*. 5(2).
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Meme, M.E. 2019. Pengaruh Pengawasan Fungsional, Transparansi, Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 8(10): 01-19.

Ningsih, F.Y.,2019. Pengaruh Penganggaran Kinerja, Tranparansi, Akuntabilitas, Penganggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Manajerial. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.